

NAVA



SHK

edisi Januari 2010 | 24 Halaman


kemiraan
partnership
governance reform in Indonesia

Cordaid 

| fitunava || navaktual || personava || navaktilas |

from IDLE to IDOL

mencoba bertahan diatas tanah berair

dalam NAVA:

|navatama || SIRG untuk keberlanjutan |
|navaku || Yana enggan pulang ke Jermun |



NAVA SHK

Salam NAVA,

kaliini:

[3] **fitunava** | *Menggalang Kekuatan Perempuan* |

[6] **navaktual** | *Membangun Kesepahaman dan Kesepakatan* |

[9] **navatama** | *Sistem Hutan Rawa Gambut: Konflik Budi-daya Akibat Pembangunan* |

[13] **navatama** | *SIRG, untuk kelestarian orang rawa gambut?* |

[17] **navaku** | *Yana enggan pulang ke Jerman*

Informasi menjadi kunci bagi kesinambungan dan sinergitas untuk bekerja secara bersama untuk mendukung gerakan pengakuan sistem kelola rakyat. Untuk itu di awal terbitan ini, Navatama akan membagi inisiatif untuk membangun simpul rumah informasi dengan pendekatan wilayah kelola rakyat di rawa gambut. Bentuk-bentuk pengakuan atas inisiatif kelola jelas akan memberikan kelestarian secara ekologis, ekonomi dan sosial untuk orang rawa gambut.

Dalam rubrik Personava, mengupas dan mengenal lebih dekat bentuk SHK dan pelaku SHK dengan mengambil sosok Khatib Bisri dari Nagari Amping Parak. Fitunava mengangkat bagaimana perempuan disana membentuk kelompok dalam mengelola lahan gambutnya. simak juga Navaktual, Navaku, Navaktilas dan Futuranava.

KpSHK menyampaikan terimakasih kepada Kemitraan (Partnership for Governance Reform in Indonesia), Cordaid, dan para pihak atas segala dukungannya, sehingga NAVA SHK dapat hadir meramaikan khasanah SHK dan Kehutanan Sosial di Indonesia.

simakjuga

Salamat membaca.

personava	19
navaktilas	21
futuranava	23

tentang NAVA

Kata “Nava” atau Nawa diambil dari bahasa sansekerta yang artinya sembilan, sesuai dengan 9 prinsip – prinsip SHK yang menjadi pijakan dalam mengembangkan dan mempromosikan dukungan terhadap keberlanjutan sistem kelola rakyat.

Nava SHK diterbitkan oleh Sekretariat KpSHK sebagai bulletin triwulanan dan didistribusikan kepada semua pihak terkait, antara lain; lembaga anggota KpSHK, pemerintah (daerah dan pusat), jaringan LSM, media, komunitas dan publik secara umum.

Kontribusi Pemikiran dalam setiap terbitan **Nava SHK**, diharapkan dapat memperkaya khasanah dan wawasan SHK dan kehutanan sosial di Indonesia.

dibelakang NAVASHK

Penanggung Jawab: Moh. Djauhari **Redaktur Pelaksana :** Sutrisno **Editor:** K. Pinilih

Redaksi: A. Farid, Dewi W. Hartanti, Hartip Simorangkir, Vicky **Kontributor** Mitra SIRG

Tata Letak navateam **Sirkulasi dan Distribusi:** Riswanto **Alamat Redaksi:** Jl Sutiragen V No 14 Perum Indraprasta I, Bantar Jati - Kota Bogor. 16153 telp/fax. (0251) 838 0301 **mailto:** kpschk@kpschk.org

WEBSITE: <http://kpschk.org/>

cerita perempuan dari sudut Nagari di Pesisir Selatan

Bertahan Menggalang Kekuatan Perempuan

Farid

Nagari Amping Parak merupakan salah satu dari tiga Nagari di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Nagari dengan luas 104, 29 km² ini, berpenduduk 11.549 jiwa—terdiri dari 6.918 laki-laki dan 5.131 perempuan. Nagari Amping Parak, berada di tengah himpitan Nagari Suaranti, di sebelah utara dan Nagari Kambang, di sebelah selatan. Sedangkan bagian timur wilayah Amping Parak, dibatasi Taman Nasional Kerinci Seblat dan di bagian barat dibatasi Samudra Hindia.

Menurut penuturan Khatib Busri 55 tahun petani sawit, Nagari Amping Parak dulu bernama Payung Perak. Nama ini diambil karena daerah ini di masa kejayaan Sultan Jamak, seperti hamparan perak.

Kasultanan Amping Parak berinduk ke kerajaan Indrapura yang berkuasa di sebelah utara Nagari Amping Parak dan menguasai sebagian besar pesisir selatan Sumatera Barat. Amping Parak memiliki perjalanan sejarah cukup dinamis, bukan hanya dari masa pra kemerdekaan ketika masih berjayanya Kasultanan Amping Parak (masa Sultan Jamak—red).

Posisinya berada di dekat kawasan hutan dan pesisir laut, seharusnya menjadi anugerah bagi masyarakat Amping Parak. Betapa tidak, darat dan laut merupakan sumber kehidupan yang bisa mereka kelola. Namun, ternyata kenyataan berkata lain. "*Hidup di dua dimensi (tempat hidup—red.) tidak menjamin kesejahteraan masyarakat Amping Parak,*" ucap

Khatib Bisri saat menjelaskan keadaan ekonomi masyarakat Nagari Amping Parak.

Sejak melonjaknya harga BBM tahun 2005, masyarakat Amping Parak, terutama para nelayan, tak lagi sanggup melaut. Biaya atau modal menangkap ikan ke laut tak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Akhirnya, mau tidak mau, masyarakat Amping Parak memilih mengelola daratan untuk bertahan hidup.

Tampaknya ini pun bukan berarti lebih menjanjikan. Wilayah daratan tidak didukung oleh kesuburan tanahnya, mengingat lahan yang mereka garap merupakan lahan gambut yang secara bertahap dibuka sejak 1950-an.

Kondisi ini menyebabkan tingginya migrasi tenaga produktif dari

Amping Parak keluar daerah—bahkan ke luar negeri.

“Mau bertani tidak ada irigasi, kami hanya bisa bertanam satu kali setahun. Mau pekerjaan lain susah di Amping Parak ini, jadilah kami berangkat ke Malaysia, dan hampir setiap keluarga disini ada yang menjadi TKI/ TKW,” ungkap Pendek, ibu berusia 37 tahun, mantan TKW.

Menjadi tenaga kerja ke luar negeri, tampaknya memang harus ditempuh Pendek dan keluarganya untuk mengejar mimpi hidup lebih sejahtera. Toh mimpi itu pun tak juga terwujud. Dua puluh tahun ibu yang sekarang menjadi penjual gorengan ini

mengadu nasib ke Negeri Jiran.

“Setiap waktu harus kami gunakan untuk mencari uang, seolah sakit pun tidak boleh. Makanya jika hanya sakit sedikit tidak pernah kami rasakan,” tuturnya.

Ketika kembali ke tanah kelahirannya di Amping Parak, Pendek dan keluarganya tetap tidak memiliki uang cukup untuk bekal istirahat di hari tuanya. Tetap saja, keinginan mendapatkan hasil dan kesejahteraan yang dikejanya, tak dapat diraih.

Lain kisah Pendek, lain pula kisah Fakhrayanti atau yang biasa dipanggil Yanti. Perempuan 27 tahun ini, memilih tetap bertahan dan menggalang kekuatan

kelompok perempuan di Amping Parak.

Upaya Yanti menggalang kelompok perempuan didasari oleh kondisi perempuan Amping Parak yang sudah tidak banyak memiliki peran tata pemerintahan Nagari, setelah kelembagaan Bundo Kandung — yang memiliki peran struktural di Ranah Minang—tak lagi banyak berfungsi.

Tekad Yanti juga dipicu kondisi sosial ekonomi masyarakat Amping Parak yang makin terpuruk setelah kondisi kesuburan lahan mereka kritis akibat ketersediaan reservoir alami di lahan gambut lenyap, digusur pembukaan perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain, nelayan yang sudah tak mampu membeli BBM, semakin terpinggirkan oleh kehadiran nelayan besar dari luar Amping Parak.

Bermodalkan semangat serta kecerdikan memanfaatkan program pemerintah lewat PNPM (Program Nasional Pemberdayaan





Masyarakat) Mandiri, Yanti membangun komunikasi dengan beberapa perempuan yang akhirnya sepakat untuk membentuk kelompok simpan pinjam perempuan.

Satu kelompok dengan delapan orang anggota akhirnya menjalankan aktivitas simpan-pinjam dengan manajemen sederhana sebagaimana seperti arisan, kelompok tersebut mengelola modal pinjaman dari PNPM se-besar 20 juta rupiah dan bunga 17% pertahun.

Dana pinjaman itu dikelola oleh masing-masing kelompok secara bervariasi, mulai dari usaha tanaman sayuran dan palawija, usaha peternakan, dan ada yang memanfaatkan untuk modal berdagang ikan dan

makanan.

Hingga saat ini, kegiatan simpan-pinjam berjalan dengan baik. Bahkan kegiatan kelompok ini telah menularkan inisiatif serupa ke beberapa perempuan lainnya hingga terbentuklah empat kelompok simpan pinjam perempuan.

“Kelompok-kelompok kecil ini kami harapkan terus berkembang. Kami berharap ke depannya bisa membentuk koperasi perempuan Amping Parak,” tutur Yanti.

Jika langkah ini mendapat dukungan dari banyak pihak, bukan tidak mungkin bisa menjadi sarana peningkatan kehidupan masyarakat dan menahan migrasi besar-besaran sumber daya produktif

masyarakat Amping Parak.

Di bidang pemerintahan, kelompok perempuan Amping Parak juga sudah mendapatkan kembali tempatnya dengan dikembalikannya organisasi Bundo Kandung ke dalam struktur pengambilan keputusan di sistem kenagarian tahun 2002.

Bundo Kandung saat ini merupakan salah satu komponen yang ada didalam badan Musyawarah kenagarian selain komponen Pemuda, Cerdik Pandai dan Ninik Mamak.



jaringan informasi rawa gambut

Kesepemahaman dan Kesepakatan

Ketika sebuah ide bergulir dan dilaksanakan maka “paham” dan “sepakat” menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mewujudkan ide tersebut dan memiliki dampak “*efek bola salju*”.

Gagasan membangun jaringan informasi rawa gambut, bertujuan mewujudkan pengakuan terhadap bentuk kelola rakyat yang masih eksis dan lestari.

Selama lebih dari satu dekade, KpSHK terus menemu-kenali sistem kelola hutan yang dilakukan oleh rakyat untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk pengakuan secara legal oleh pemerintah. Hal ini juga yang memicu sebuah pertanyaan, kebanyakan

sistem kelola hutan yang dikerjakan oleh masyarakat diidentifikasi pada kawasan hutan yang berada di wilayah pegunungan, lalu apakah masih ada sistem kelola rakyat di kawasan rawa gambut? Wilayah yang dulunya oleh sebagian besar pihak disebut kawasan terlantar.

Sejak 1995, kawasan ini selalu dijadikan titik panas atas bencana kebakaran besar hutan dan lahan yang terjadi. Tak jarang juga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut dijadikan kambing hitam atas peristiwa yang terjadi.

Banyak program yang ditelurkan pada kawasan tanah berair ini. Yang paling menyita perhatian dan menjadi pembicaraan banyak orang adalah bagaimana “Program Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar” (*Mega Rice Project*) digulirkan pemerintah yang hanya berujung pada kegagalan.



Belakangan orang banyak berbicara mengenai lahan gambut sebagai penyelamat iklim. “*Selamatkan Gambut untuk Kestabilan Iklim*” demikian kira-kira slogan terbaru yang muncul ke permukaan. Berhitung kandungan arang yang ada didalamnya, berharap ada pasar sukarela yang mau membeli karbon tersebut.

Bagaimana kemudian nasib masyarakat yang turun temurun bergantung hidupnya di lahan berair tersebut?



oleh: **Sutrisno**

Ini yang kemudian coba dijawab melalui inisiasi “Upaya Memperkuat Jaminan Status Penguasaan Ruang Kelola yang Berkelanjutan Bagi Orang Rawa Gambut” yang di mulai dengan membangun sistem informasi yang kuat.

Bekerja bersama dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam membentuk “rumah informasi” yang bergerak secara dua arah (masyarakat-LSM-industri- pemerintah) menjadi fondasi untuk keberlanjutannya.

Kesepakatan kemudian terbangun antara KpSHK sebagai pengembang Sistem Informasi Rawa Gambut dengan Walhi Sumatera Selatan, Walhi Jambi dan Walhi Sumatera Barat sebagai penyambung sistem, untuk kemudian bekerja bersama WBH di Sumsel, perkumpulan Qbar di Sumatera Barat dan Pinse di Jambi.

Langkah awal dari proses membangun sistem informasi ini adalah penguatan data. Selama periode Desember 2009 kegiatan *assessment* dilakukan bersama dengan mitra untuk mempertajam dan

memperkuat data lapang. *Assessment* dilakukan menggunakan *assessment tools* yang juga dibuat dengan keterlibatan multipihak mengambil sudut pandang ekologi-ekonomi-sosial.

Kegiatan *assessment* ini dilakukan di tiga provinsi di Sumatera.

Gambut OKI

Pengambilan data dengan menggunakan metode *Focus Group Interview* dilakukan pada empat desa di Kecamatan Pangkalan Lampam, antara lain; Desa Talang Nangka, Rambai, Jermun dan Riding di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Responden yang menjadi target group terdiri dari delapan sampai dua puluh orang.

Beberapa pernyataan dan fakta yang tergalil dari kelompok-kelompok responden ini adalah; (1) setiap anggota masyarakat yang hidup di empat desa tersebut sudah secara turun temurun. (2) pembagian wilayah kelola atau garapan keluarga ditunjuk juga secara turun temurun dan berdasar-

kan kesepakatan yang diakui oleh masing-masing desa sekitarnya sehingga belum pernah ada kejadian perebutan lahan garapan antar masyarakat. (3) lahan gambut garapan masyarakat dimanfaatkan sebagai lahan padi sonor, perikanan darat, pengambilan kayu untuk kebutuhan pembuatan rumah. (Kayu yang diambil merupakan kayu prepat yang terbenam dalam rawa yang terbakar habis pada peristiwa kebakaran besar yang melanda lahan gambut di Kecamatan Pangkalan Lampam pada tahun 1991), kebun karet, pengrajin purun (sejenis rumput rawa) untuk dibuat tikar, alas kaki, tas, tempat tissue yang dilakukan secara individual.(4) hasil dari lahan gambut biasa dipakai untuk konsumsi sendiri, sebagian besar disimpan sebagai cadangan makanan sampai tiba musim panen berikutnya, bila ada sisa akan dijual di desa atau desa tetangganya, (5) permasalahan yang dihadapi oleh petani adalah dengan adanya pengembangan perkebunan sawit yang mengakibatkan banyak kerugian baik

moril maupun materiil, beberapa konflik sudah terjadi dengan ditangkanya beberapa anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan alasan menolak sawit, (6) kecemasan masyarakat dengan tidak adanya jaminan hukum yang melindungi mereka untuk tetap mengelola lahan gambut sendiri.

Gambut Timur Jambi

Sebaran kawasan gambut di pesisir timur Jambi secara ekologis merupakan kawasan gambut di provinsi Sumatera Selatan dan Riau.

Kegiatan *assessment* di kawasan gambut timur Jambi mengambil titik temu di tiga Desa di Muaro Jambi. Desa Tangkit Baru dan Sumber Agung di Kecamatan Sungai Gelam dan Desa Arang - Arang di Kecamatan Kumpeh Ulu.

Masing - masing desa mempunyai karakteristik tersendiri dari segi ekologi, sosial dan ekonominya.

Desa Tangkit baru diakui sebagai desa definitif pada tahun 1998 dan

merupakan pemekaran dari Desa Tangkit. Desa ini terletak di kawasan kubah gambut yang kemudian diolah menjadi kebun-kebun nanas keluarga dengan menggunakan metode parit yang dibuat secara beraturan menggunakan pengetahuan lokal yang diadaptasi oleh 22 kepala keluarga yang membuka lahan tersebut. Parit ini yang kemudian oleh pihak desa dikembangkan menjadi batas antara kampung dan RT yang tersebar di desa tersebut.

Desa Sumber Agung, sebagai desa percampuran antara masyarakat asli dan pendatang memiliki permasalahan serupa dengan yang dialami masyarakat Melayu Desa Arang-Arang, Kecamatan Kumpeh Ulu.

Kedua desa ini berbatasan langsung dengan perkebunan sawit skala besar. Ini yang kemudian menyebabkan perubahan kultur dari masyarakat dari petani gambut dan pekebun buah, dan memilih menjadi buruh perkebunan dan mitra plasma dari perusahaan.

Gambut Nagari

Aturan adat nagari masih kental dalam pengelolaan sumberdaya alam di Pesisir Selatan Sumatera Barat, termasuk dalam pengelolaan kawasan gambut. Belum ditambah inisiatif dari perempuan Amping Parak dalam memanfaatkan kesempatan bantuan dari Pemda melalui program PNPM Mandiri. Geliat ekonomi digerakkan melalui aktifitas kelompok perempuan dengan berdagang, menanam palawija dan sayur mayur, serta beternak sapi.

Kanal yang dibangun membelah kebun sawit milik rakyat, hingga kini masih bermanfaat bagi kelompok tani sawit yang ada. Tak pasti tujuan dari pembuatan kanal tersebut, yang jelas mempertebal kekhawatiran masyarakat Amping Parak, ditambah pembangunan "*ambung*".

(nino)

...Seseorang (anggota masyarakat—red.) tak dapat memegang teguh kebudayaannya, kalau dirinya tak hidup di kalangan kebudayaannya tersebut
—Onghokham —

Sistem Hutan Rawa Gambut Konflik Budidaya



Mohammad Djauhari

Kebudayaan adalah produk suatu bangsa sebagai kesatuan sosial dari kelompok-kelompok masyarakat. Salah satu produk kebudayaan adalah budidaya masyarakat, sebagai hasil adaptasi masyarakat terhadap alam dan lingkungannya yang saling berkait erat. Budidaya masyarakat sebagai hasil adaptasi dengan alam dan lingkungannya, sangat khas dan hanya dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu.


Orang gunung, orang pesisir, orang laut adalah sebutan sosial bagi

masyarakat tertentu karena mereka berdiam diri dan mencari penghidupan di kawasan alam yang berupa pegunungan, pesisir, maupun laut. Begitu pun dengan sebutan orang rawa gambut, sebutan sosial bagi masyarakat yang berdiam diri dan mencari penghidupan di kawasan rawa gambut.

Di Sumatera Selatan, usaha budidaya yang dilakukan oleh orang rawa gambut di sektor pertanian berupa pertanian sonor, bekayu (mengolah sisa-sisa pohon jaman lampau yang terbenam di kedalaman 1-2

meter rawa gambut), memproduksi tikar dari rumput rawa (tikar purun) dan beternak kerbau dan sapi, serta berkebun karet (mengusahakan tanaman karet rakyat di gambut padat atau talang). Di Kalimantan Tengah, orang rawa gambut mengusahakan *beje* (budidaya ikan air rawa gambut), beternak kerbau dan sapi lepas, berkebun karet di natau (pulau-pulau gambut), dan tempat mencari rotan untuk diolah menjadi bahan kerajinan.

Kawasan rawa gambut meliputi sepertiga wilayah daratan Indonesia, yang



tersebar di tiga pulau besar yaitu; Sumatera, Kalimantan dan Papua. Saat ini, rawa gambut di tiga pulau tersebut, diperkirakan masih seluas 22 juta ha, setelah mengalami berbagai peruntukan dan pemanfaatan akibat pelaksanaan kebijakan kehutanan dan pertanian. Peruntukkan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan hutan tanaman dan perkebunan kelapa sawit di kawasan rawa gambut Sumatera, telah menggeser (men-caplok areal) budidaya khas setempat.

Sebut saja konflik RAPP (Riau Andalan Pulp Paper) dengan masyarakat Teluk Meranti di Semenanjung Kampar, Riau baru-baru ini. Konflik Sinar Mas Divisi Forestry dengan masyarakat Desa Riding, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, ber-keanaan dengan 10.000 ha lahan rawa gambut masyarakat yang

diakuisisi sepihak oleh perusahaan. Sengketa 8.000 ha lahan rawa gambut antara masyarakat adat Melayu Riding Rambai di empat desa di Kecamatan Pangkalan Lampam dan PT. Persada Sawit Mas. Sengketa-sengketa ini menggerus budidaya setempat.

Sistem Hutan Rawa Gambut

Masyarakat lokal atau adat melakukan budidaya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya (subsisten) jauh sebelum pelaksanaan pembangunan pertanian dan kehutanan komersil. Cara mengelola, memanfaatkan sumberdaya alam ini bagi masyarakat lokal (adat) dilakukan dalam skala luasan kecil dan telah berlangsung secara turun-temurun. Model pengelolaan ini membentuk hutan-sistem hutan-dimana dalam satu arealnya terdapat berbagai jenis tanaman.

Model pengelolaan masyarakat lokal (adat) bisa ditemukan di Krui, Lampung Barat, misalnya. Masyarakat adat 16 marga di sana membudidayakan tanaman damar untuk diambil getahnya. Sistem hutan tersebut ini disebut Repong Damar, yang di dalamnya selain tanaman utama terdapat juga tanaman lain seperti kopi, buah-buahan, palawija dan sebagainya.

Di Aceh dikenal dengan sebutan Kebun Kemiri, di Riau dengan sebutan Kebun Sagu, di Sumatera Barat dengan sebutan Parak, di Sulawesi Tengah dengan sebutan Lopolehe, di Papua dengan sebutan Seke. Di Sumatera Selatan, khususnya di Ogan Komering Ilir, tanaman karet di lahan rawa gambut (khususnya di tanah gambut atau talang) juga ditanam secara sistem hutan. Dimana karet muda diselang seling dengan tanaman pisang, cabai,

singkong, di dalam satu areal budidaya gambut.

Sistem hutan di rawa gambut tidak jauh berbeda dengan yang di praktikkan di kawasan lainnya. Di Amping Parak, Sumatera Barat, masyarakat adat mempraktikkan untuk tanaman sawit yang dipadu dengan tanaman palaqwijia seperti jagung, sayur mayur, coklat dan kopi. Walau hal ini belum tentu tepat dengan kelestarian, karena yang menjadi persoalan saat ini tanaman sawit diduga sebagai tanaman rakus air dan tidak bisa dipadukan dengan tanaman lain, sistem hutan masih

berlangsung di Sumatera Barat yang kini tidak lekang dari pengembangan sawit melalui budidaya oleh masyarakat adat.

Konflik Penguasaan dan Budidaya Rawa Gambut tanah-tanah di Indonesia relatif berstatus tidak bertuan (tanah yang tidak dibebani hak atau tanah negara). Ini karena politik penguasaan lahan dan hutan. Departemen Kehutanan masih berpegang teguh kepada Undang-Undang Pokok Kehutanan No.5 tahun 1967 (sekarang UU No.41 tentang Kehutanan tahun 1999) dimana 71% daratan Indonesia adalah kawasan hutan.

Selain karena politik penguasaan lahan dan hutan oleh Departemen Kehutanan, pengaturan dan penataan agraria (termasuk distribusi tanah) belum sama sekali terjadi, berimplikasi kepada tidak adanya jaminan hak penguasaan dan pengelolaan bagi masyarakat yang memiliki klaim terhadap kawasan budidayanya. Seperti dituturkan Bunawas (26 tahun), Kepala Desa Talang Nangka, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. "*Tanah-tanah di sini tidak bersurat, masyarakat mengelola lahan rawa gambut sudah turun-temurun (diwariskan-red.),*



termasuk areal pemukiman.”

Konflik Budidaya

Konflik klaim kawasan budidaya antara masyarakat lokal (adat) dengan pemerintah (negara) bermula dari dua hal tersebut. Fay (2004), menyebutkan 56% kawasan hutan *coinside* (tumpang tindih klaim) dengan kawasan budidaya masyarakat lokal (adat). Hal ini juga terjadi di kawasan budi daya rawa gambut.

Kondisi yang demikian, untuk beberapa pedesaan rawa gambut di Sumatera Selatan, Surat Penguasaan Hak (SPH) yang dikeluarkan oleh desa tidak berlaku dan jarang masyarakat mengajukan SPH.

Konflik penguasaan kawasan ini kemudian semakin tajam dan meningkat. Pengembangan perkebunan kelapa sawit di beberapa kawasan rawa gambut mengalami konflik penguasaan antara masyarakat lokal (adat) dengan perusahaan pengembang. Di Kawasan Rawa Tripa di Aceh-Sumatera Utara, di Kawasan Danau

Sentarum di Kalimantan Barat, di Kawasan Semenanjung Kampar di Riau, di Kawasan Rawa Gambut PLG (Pembangunan Lahan Gambut Satu Juta Hektar) di Kalimantan Tengah, perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman mengeser klaim masyarakat yang memiliki sistem hutan.

Menyimak apa yang disampaikan Ongkhokham (sejarawan Indonesia) di awal tulisan, tampaknya memberikan penegasan bagi antitesanya; perubahan orientasi budidaya yang berkembang ke arah komersil—upaya-upaya pembangunan di sektor pertanian (budidaya perkebunan sawit skala besar) dan kehutanan (budidaya hutan tanaman industri) di Indonesia—berbenturan dengan budidaya yang sudah berkembang di masyarakat lokal atau adat.

Konflik budidaya tersebut (tentu prosesnya bersamaan dengan asimilasinya) berjalan secara alami dan di beberapa tempat ada penekanan (penggeseran secara paksa). Sistem hutan di Sumatera Barat atau Parak saat ini tak lagi

antara tanaman kopi, lada, tanaman pohon, dengan tanaman semusim atau palawija, melainkan "*tumpang sari*" (kebun campuran) antara tanaman sawit dengan palawija. Dari cerita dan penuturan masyarakat adat setempat, hal demikian berlangsung sejak Sumatera Barat menjadi wilayah target PIR-Trans (program transmigrasi Perkebunan Inti Rakyat Kelapa Sawit) di tahun 1980-an.

Di tempat lain, semisal di Kabupaten OKI, sejak ada konflik antara masyarakat adat Melayu Riding Rambai dengan PT. Persada Sawit Mas (PSM) tentang 8.000 ha lahan rawa gambut (saat ini sudah dikembalikan seluas 5.000 ha kepada masyarakat), budidaya kelapa sawit menjadi bayang-bayang yang selalu menghantui budidaya tanaman karet yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat adat di sana sejak lama (dengan cara *tumpang sari*). Bahkan masa konflik yang memakan waktu lima tahun, secara kejiwaan sosial masyarakat mendapat pilihan tetap membudidayakan karet atau sawit.

“Informasi adalah sesuatu yang membuat pengetahuan kita berubah yang secara logis mensahkan perubahan, memperkuat atau menemukan hubungan yang ada pada pengetahuan yang kita miliki”.
(Shannon)

Sistem Informasi Rawa Gambut (SIRG)

Sebuah upaya untuk memperkuat jaminan status penguasaan ruang kelola yang berkelanjutan bagi Orang Rawa Gambut



A. Farid

Siratan makna definisi informasi yang diungkap oleh Shannon secara gamblang menekankan bahwa informasi memegang peranan penting dalam sebuah perubahan yang terjadi di masyarakat, pergerakan arah perubahan baik positif maupun negatif dalam perspektif dominan sedikit banyak dipengaruhi oleh arus informasi yang masuk kedalam sistem

sosial masyarakatnya.

Kenyataan ini semakin meyakinkan ketika kita mencoba untuk membuka kembali dokumen kehidupan sosial masyarakat di wilayah yang sudah menjadi mitra organisasi masyarakat sipil, seperti yang terjadi di Nagari Amping Parak, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dimana pilihan masya-

rakat untuk membuka hutan serta menanaminya dengan pohon sawit tidak bisa dilepaskan dari gencarnya informasi tentang “persawitan” baik yang didengar dari para pekerja industri sawit yang berada di kecamatan tetangganya, dari pemerintah maupun dari kelebatan-kelebatan informasi yang didapat di lapau juga tempat-tempat lainnya. Disisi lain informasi pembeding terkait

ekses/ dampak perkebunan sawit terhadap kemandirian serta keberlanjutan kehidupan masyarakat dan lingkungannya sangatlah minim.

Sehingga pilihan masyarakat jatuh pada informasi dominan yang masuk kedalam alam pikirannya orang per-orang yang bermuara pada pemikiran kolektif kelompok tani di Amping Parak "GAPOKTAN".

Kecocokan antara pandangan teoritis dan realitas yang terjadi di masyarakat ini, semakin menguatkan tekad KpSHK secara institusi-

onal untuk secara serius meletakkan pondasi penguatan di masyarakat lewat bangunan sistem informasi sebagaimana yang digagas dalam program

"Membangun Sistem Informasi Rawa Gambut untuk Memperkuat Jaminan Status Penguasaan Ruang Kelola yang Berkelanjutan bagi Orang Rawa Gambut di tiga Kabupaten di Sumatera".

Yang akan menjadikan kekuatan informasi dan pengetahuan tentang rawa gambut sebagai kunci perubahan sikap

dan perilaku sosial-ekonomi-ekologi bagi para pihak (*multi stakeholders*) dan perubahan kebijakan kehutanan demi tercapainya tata kelola yang baik sesuai dengan pembangunan berkelanjutan

Untuk mewujudkan rencana tersebut kpSHK mendapat dukungan dari KEMITRAAN untuk masa pelaksanaan kegiatan selama enam bulan terhitung mulai dari bulan Desember 2009 hingga bulan Mei 2010 dengan tiga wilayah *pilot project* yakni di Nagari Amping Parak, Kabupaten Pesisir Selatan (Sumbar), Desa Sumber Agung, Tangkit

Secara programatik, agenda SIRG ini sendiri memiliki tiga Output, meliputi:

1. Terdokumentasinya informasi dan pengetahuan tentang rawa gambut yang dapat memperkuat jaminan status penguasaan ruang kelola orang rawa gambut yang berkelanjutan
2. Terbangunnya Sistem Informasi Rawa Gambut (SIRG) yang mudah diakses oleh setiap pemangku kepentingan (*stake holders*) untuk memperkuat jaminan status penguasaan ruang kelola orang rawa gambut yang berkelanjutan
3. Terdiseminasinya informasi dan pengetahuan tentang rawa gambut kepada kelompok sasaran yang dapat memperkuat jaminan status penguasaan dari ruang kelola orang rawa gambut yang berkelanjutan



Baru di Kecamatan Sungai Gelam dan Desa Arang - Arang di Kecamatan Sungai Kumpeh-Kabupaten Muaro Jambi (Jambi), Desa Riding, Desa Jermun, Desa Talang Nangka dan Desa Rambai, di Kecamatan Pangkalan Lampam-Kabupaten OKI (Sumsel).

Untuk terjadinya sinergi serta menjaga keber-

lanjutan kegiatannya KpSHK menggandeng mitra dari masing-masing wilayah tersebut, yakni WALHI Jambi, WALHI Sumatera Selatan serta WALHI Sumatera Barat.

Fokus Program ini berada pada aktivitas membangun rumah informasi dan pengetahuan melalui pembentukan simpul-simpul informasi di tiga

lokasi program dengan materi informasi berupa hasil pendokumentasian dari fakta, data dan analisisnya tentang kondisi rawa gambut, orang rawa gambut, jaminan status penguasaan lahan, dan dinamika perubahan kebijakan di daerah-pusat.

Penyebaran informasi dan pengetahuan ditujukan kepada semua pe-

mangku kepentingan (*stakeholders*) agar dapat memperkuat jaminan status penguasaan ruang kelola oleh orang rawa gambut di lokasi program dan pe-rubahan kebijakan di tingkat kabupaten dan pusat.

Sistem informasi berikut perangkatnya akan dibangun sesuai dengan kecenderungan teknologi informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses sasaran program (penerima manfaat).

Diluar target program-atik, KpSHK sendiri mempunyai mimpi besar

untuk mewujudkan sebuah sistem dokumentasi dan desiminasi informasi yang dapat membantu proses advokasi yang sedang dan atau akan dilakukan oleh berbagai kalangan khususnya dari komponen organisasi masyarakat sipil.

Walaupun secara sadar KpSHK mengakui bahwa inisiatif ini bukanlah inisiatif baru di kalangan Organisasi Masyarakat Sipil, namun secara sadar pula KpSHK pun mengakui bahwa inisiatif yang telah dibangun sejak tahun 90-

an tersebut banyak yang jalan di tempat dan bahkan rontok di tengah jalan.

Karenanya gagasan ini kembali akan dihidupkan dengan formulasi yang sedikit berbeda, serta hasil yang dibangun secara bertahap.

(navatama/frd)



Buka Rawa Gambut Untuk Sawit

Yana Enggan Pulang ke Jerman

Yana, perempuan yang hingga kini belum mau kembali ke desanya, Desa Jerman, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan ini kerap merindukan aktivitas kesehariannya.

Dulu, sebelum adanya pengambilan lahan rawa gambut seluas 400 ha oleh salah satu perusahaan sawit di enam desa di OKI, Yana setiap harinya pergi menoreh karet dan bertani sonor di musim tanam padi.

Bahkan bersama beberapa perempuan di Desa Jerman, Yana sempat membentuk satu kelompok perempuan demi melestarikan kerajinan tikar purun (purun, rumput rawa gambut-red). Yang kemudian kelompok perempuan ini dilarang keberadaannya oleh

camat setempat tanpa alasan yang jelas.

“Sekitar tahun 60-an, orang tua kami dapat pembagian tanah rawa. Dulu hutan di Jerman. Pemerintah membukanya, dan mengambil kayu,” tutur Yana saat ditemui penulis di Kantor WALHI Sumsel beberapa waktu lalu.

Dari penuturan Yana yang saat ini sudah berusia 58 tahun, tanah rawa gambut sebagai pemberian pemerintah kepada masyarakat setempat menjadi lahan penghidupan untuk menanam karet dan bertani sonor.

Walau tanpa ada proses pengesahan kepemilikan tertulis, tanah rawa gambut sudah puluhan tahun menjadi kesepakatan antar ketua adat Melayu

di OKI.

Yana yang saat ini menjadi orang tua tunggal dari anak perempuannya yang sedang menempuh pendidikan tinggi di salah satu perguruan tinggi di Palembang, Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan, sangat menyayangkan tindakan Kepala Desa Jerman. Dengan alasan untuk pinjam pakai, tanah rawa gambut masyarakat desa Jerman ditanami sawit oleh perusahaan sawit.

“Gambut dibuka dan kebun karet pun ikut terbakar tiba-tiba. Setelah tanya ke desa (kepala desa-red), untuk pinjam pakai sementara,” tegas Yana menilai tindakan kepala desanya yang secara sepihak.

“Saya pun tak boleh pulang. Desa anggap saya provokator, hingga kejadian bentrok dan tolak sawit,” tutur Yana lebih lanjut tentang tindakan sewenang-wenang kepala desa terhadap dirinya.

Yana yang hampir berbulan-bulan tinggal sementara di Kantor WALHI Sumsel ini merasa semua miliknya terampas begitu saja. Dalam bayangannya, bertani sonor sudah tak lama ditekuninya.

Padahal gantungan hidupnya berada di tanah rawa gambut warisan orang tuanya yang pada tahun 60-an mendapat bagian dari pemerintah.

“Bersonor padi tak pakai pupuk. Kami tak mengerti pakai pupuk. Dan kebiasaan di kami begitu adanya soal sonor,” ungkap Yana tentang tradisi bersonor bagi sebagian besar masyarakat di OKI.

Kondisi Desa Jermun, sejak masuknya per-

usaha sawit yang membuat kanal-kanal di 400 ha rawa gambut di enam Desa di OKI semakin buruk. Dulu, walau merupakan pedesaan tanpa penerangan listrik, karena belum masuknya saluran listrik pemerintah, sumber air masih tersedia dan bersih.

Yana pun mengiyakan dalam penuturannya kepada penulis tentang kondisi Desa Jermun sebelum ada perusahaan sawit.

“Aku sedih, ingat deras karet 5-6 hari seminggu. Ini seperti di pen-jara. Walau saat ini situasi tak sepanik dulu, aku tak akan pulang. Kepala desa diganti, aku akan pulang dan mengurus kembali karet,” ungkap isi hati Yana saat di-tanya penulis kapan ia akan kembali ke desa-nya yang memberikan sejuta harapan hidup dengan mengelola se-hektar lahan karetnya yang selama ini ter-bengkalai. (tjong)

“Bersonor padi tak pakai pupuk. Kami tak mengerti pakai pupuk. Kebiasaan di kami begitu adanya soal sonor,”

perempuan gambut OKI sebagian besar menggantungkan hidup dari hasil kebun karet



lebih dekat:

“Betambangan di Laut Betepakan di Darat”

Tanah Perak Kian Terancam
wawancara dengan Khatib Bisri (55 tahun)

Awal mula kehadiran masyarakat Amping Parak

Keluarga kami berasal dari Solok yang pergi melakukan perjalanan ke wilayah pesisir ini sejak sebelum jaman kemerdekaan (tidak ingat tahunnya). Perjalanan dilakukan secara bertahap dari Solok menuju Tarusan dan berlanjut ke Taratak hingga sampailah di Amping Parak. Di Amping Parak sendiri sudah ada masyarakat yang datang lebih dahulu, mereka berasal dari berbagai daerah seperti dari Sintung, Sungai Tawar, Muara Labuh, Koto Tinggi, Koto Ranah

Apa yang dikerjakan masyarakat saat itu

Masyarakat yang datang ke Amping Parak hampir semuanya berasal dari wilayah udik/pedalaman, sehingga pekerjaan awal mereka ke sini sebagian besar sebagai petani dengan membuka hutan

ke arah perbukitan sekitar wilayah yang saat ini dipatok pemerintah sebagai Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS).

Ada istilah “*Betambangan di laut dan Betepakan di darat*” untuk menjelaskan aktivitas keseharian warga di sini. Masyarakat yang datang ke Amping parak dari waktu ke waktu terus bertambah yang diawali dengan upaya mencari keluarga yang sudah datang terlebih dahulu “*Hinggap mencakam tebang menumpu*”.

Kondisi lingkungan di wilayah Amping Parak saat itu

Menurut cerita bapak saya dan sepengetahuan saya saat itu kondisi lingkungan masih hutan lebat, masyarakat datang ke sini melakukan penebangan pohon (membuka lahan...red) untuk dijadikan lahan pertanian dan perladangan. Lahan masyarakat Amping Parak

saat itu cukup luas hingga jauh masuk ke wilayah yang sekarang ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah terlarang (TNKS-red). Seiring perjalanan ada juga cerita bahwa masyarakat kemudian pindah mendekati pinggir pantai karena kalah oleh banyaknya belut serta ancaman dari binatang buas.

Pada saat berpindah dari daerah pedalaman ke wilayah pesisir banyak yang lewat kampung Bayang (sebelah utara) karena daerah tersebut cukup bagus untuk melihat hamparan laut, sehingga selalu terbayang-bayang oleh masyarakat. Karenanya hingga saat ini daerah tersebut di sebut Bayang.

Asal muasal nama Amping Parak

Menurut penuturan orang tua dulu, asal nama Amping Parak adalah Payung Perak, karena Sultan Jamak biasa memakai payung perak. Ada juga cerita asal namanya adalah Hamparan Perak, tidak jelas hamparan perak seperti apa, karena disinipun belum ada yang tahu apakah ada kandungan perak atau

lainnya.

Amping Parak sendiri merupakan nama yang lebih populer, mungkin untuk memudahkan orang menyebutnya.

Nagari Amping Parak dulu merupakan daerah yang istimewa karena beberapa keunggulan sultannya terutama. Pernah ada cerita bahwa pasukan berkuda Belanda pernah tidak bisa jalan ketika melewati depan kediaman Sultan. Kemudian setelah melakukan komunikasi dengan Sultan barulah mereka bisa melanjutkan perjalanan lagi.

Amping Parak sendiri dulunya merupakan sebuah kerajaan kecil yang (kemungkinan) berinduk ke kerajaan Indrapura (disebelah utara).

Kerajaan ini lebih dulu ada daripada kerajaan Pagaruyung. Kekuasaan wilayah kerajaan Indrapura meliputi sebagian besar wilayah pesisir selatan.

Proses perubahan nama nagari ke desa kemudian ke nagari lagi

Kecamatan Sutera merupakan hasil pemekaran

dari kecamatan Pulau Kapas. Kecamatan Sutera merupakan penggabungan dari tiga ke-nagarian yakni Nagari Suranti, Nagari Taratak dan Nagari Amping Parak. Nama kecamatan ini merupakan sebutan yang biasa disebut sejak jaman PRRI masa *Resilien Idris*, yang kemudian dirubah paska pemberontakan PRRI, dan saat ini dikem-balikan lagi namanya menjadi tetap Sutera.

Perubahan dari nagari menjadi desa tahun 1984 (pada jaman Suharto) dan ke-mudian dirubah lagi menjadi nagari pada tahun 2002. Nagari Amping Parak sendiri merupakan gabungan dari lima desa yakni: Hamparan Perak, Pantai Cermin, Padang Taro, Koto Nan Tigo, dan ... (*untuk kota kelima Khatib Bisri lupa namanya*)

Dari sisi wilayah, Amping Parak saat ini sebenarnya tidak terlalu luas, bagaimana masyarakat bisa bertahan hidup

Wilayah Amping Parak sebenarnya luas jauh kearah selatan (Suranti), ke Utara (Kambang) dan ke Timur (TNKS). tapi diopensif (direbut-red) oleh ketiga pihak terse-

but. Dan daerah yang direbut merupakan daerah yang subur.

Karenanya saat ini wilayah Amping Parak sudah tidak terlalu besar. Untuk mengambil kembali wilayah-wilayah yang *di opensif* tersebut, masyarakat dan pihak nagari seakan tidak melakukan apa-apa, mungkin karena ketiadaan daya untuk menghadapinya. Ada upaya untuk mengambil kembali tanah anak nagari di areal yang diklaim oleh Pemerintah yang kemudian diplotkan oleh Pemerintah untuk lahan cadangan transmigran dengan luas sekitar 300 ha. Upaya ini mulai dilakukan sejak tahun 2003–2006 yang diawali oleh 30 orang masyarakat Amping Parak membuka lahan, aktivitas *reclaiming* ini mendapat hambatan dari Polres setempat yang berujung pada penahanan masyarakat pada 2006.

Tata aturan yang secara turun temurun dijalankan oleh anak nagari Amping Parak

Tata aturan masyarakat Amping Parak sejak jaman Sultan Jamak telah memiliki dua *aras*, pertama tata aturan ulayat

nagari yang diurus oleh Ninik–Mamak, dan urusan yang berhubungan dengan pemerintahan diurus oleh kenagarian.

Beberapa contoh hal-hal yang diurus oleh ninik mamak diantaranya: pembagian lahan, perkawinan.

Ninik mamak juga terkadang membantu urusan pemerintah (nagari) dengan mengambil peran sebagai pengumpul dana iuran dari masyarakatnya. Dalam urusan hak yang dimiliki ninik mamak ini menurut sebagian para keponakannya sudah tidak lagi berperan secara aktif dan sudah tidak dapat melakukan dengan efektif, karenanya banyak dari para keponakan sudah tidak percaya terhadap peran ninik mamak.

Kehidupan ekonomi masyarakat Amping Parak saat ini

Sebagai masyarakat yang hidup di dua dimensi (ruang kelola--red) karena faktor geografis yang berpadu antara lahan garapan daratan dan perairan laut harusnya mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, namun kenyataannya masyarakat Amping

Parak tetap tidak dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan secara signifikan.

Untuk nelayan sendiri dulunya mereka beraktivitas sebagai *payung dayung* (perahu dayung-red), saat ini sudah ada juga yang meningkat jadi *payung mesin* (nelayan perahu mesin-red).

Namun demikian peningkatan alat tangkap ini juga menghadapi kendala ketika harga minyak naik, di sisi lain harga ikan sulit untuk dinaikkan.

Catatan tambahan

Saat ini sedang dibangun danau buatan/ambungan di pedalaman Amping Parak (Kampung Taratak Panas) sejak 2008 yang akan dipergunakan untuk pengaturan irigasi sawah dengan sumber utama air dari sungai Amping Parak dan beberapa anak sungai kecil.

Ada kekhawatiran dari masyarakat soal resiko

yang harus dihadapi masyarakat dari pembuatan Ambung tersebut, kekhawatiran terutama jika bendungan ambrol.

(frd)



sinava, merupakan kolom yang menyajikan kegiatan terkait dengan hutan kerakyatan dan kehumanan sosial yang berlangsung mulai dari tingkatan lokal sampai nasional.

Assesment Lapangan Program Sistem Informasi Rawa Gambut - SIRG

Kegiatan ini bertujuan untuk melihat fakta-fakta lapangan terkait dengan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat di kawasan bergambut yang ada di tiga wilayah yakni Pesisir Selatan (Sumbar), Muaro Jambi (Jambi) dan OKI (Sumsel), yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2009–6 Januari 2010.

Untuk membantu proses *assessment* ini telah dirumuskan juga *assessment tools* yang melibatkan beberapa organisasi masyarakat sipil, agar *assessment tools* ini nantinya dapat juga dipakai oleh mitra.

Riset Status Penguasaan kawasan rawa gambut 3 wilayah di Sumatera

Kegiatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana status penguasaan kawasan gambut di wilayah target program berdasarkan klaim para pihak. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat

fakta-fakta lapangan terkait dengan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat di kawasan bergambut yang ada di tiga wilayah yakni Pesisir Selatan (Sumbar), Muaro Jambi (Jambi) dan OKI (Sumsel), yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2009–6 Januari 2010.

Assessment tools juga dipakai oleh mitra sehingga akan memunculkan secara jelas bagai-mana irisan-irisan “*klaim*” tersebut terjadi dan di wilayah yang mana saja.

Informasi ini akan sangat membantu kita lebih fokus dalam merancang dan menyelesaikan masalah/konflik di masyarakat. Untuk menunjang pencapaian output dari riset ini, KpSHK merancang beberapa rangkaian kegiatan yakni:

- a). Pembuatan Tools riset
- b). Peningkatan kapasitas untuk para periset di daerah, serta
- c). Pelaksanaan riset itu sendiri. diharapkan dapat diselesaikan sampai bulan februari 2010.



Riset potensi sumber daya rotan komunitas (Kalteng dan Kaltim) - RMU

Riset ini akan dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Januari–Februari 2010, dengan melibatkan tim riset dari Bogor dan mitra di daerah (YPD untuk wilayah Kalteng dan Craft-NTFP IP di Kaltim). kegiatan ini merupakan bagian dari program Rattan Monitoring Unit (RMU)

Keberlangsungan Hutan dan Akses Masyarakat Pinggir Hutan

Kawasan hutan Indonesia seluas 143 juta hektar (Latin, 2001), 72 juta hektar diantaranya masih relatif bagus (Kementerian Lingkungan Hidup, 2008). Kawasan hutan dan hutan Indonesia adalah penyedia kebutuhan kayu nasional dan internasional, terutama untuk konstruksi, meubel dan kertas. Kerusakan dan penyusutan hutan akan berdampak kepada pemenuhan kebutuhan tersebut.

Sejak terjadinya konversi besar-besaran kawasan hutan menjadi areal perkebunan dan tambang (dampak otonomi daerah), dengan laju deforestasi mencapai 2,82 juta hektar pertahun (Departemen Kehutanan, 2008), pasokan kayu legal (*certified*) untuk nasional dan dunia berkurang.

Paradigma pembangunan ekonomi kehutanan yang masih berorientasi pada hutan sebagai sumber kayu, membuat potensi sumber-sumber bahan baku lain yang bernilai ekonomis, tak tergarap dengan baik. Padahal, kawasan hutan dan hutan

Indonesia tidak hanya menyediakan kayu, juga memasok bahan baku non kayu bagi industri nasional dan internasional. Salah satu hasil hutan non kayu adalah rotan. Indonesia pemasok terbesar rotan dunia (300.000 ton pertahun atau 80 % dari rotan dunia) yang di industri hilirnya bersaing dengan China dan Jerman. Saat laju deforestasi meningkat, sektor rotan ikut terganggu karena keberlangsungan rotan sangat tergantung dari keberlanjutan kawasan hutan.

Rotan tidak saja menjadi komoditi yang memberi pemasukan bagi negara. Rotan juga menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat pinggir hutan sebagai pencari rotan, petani rotan — pembudidaya rotan, pengumpul rotan dan pengrajin rotan. Bahkan sektor kerajinan rotan nasional mampu menyerap sekitar 600.000 tenaga kerja.

Rotan dan Masyarakat Adat di Kalimantan

Masyarakat adat atau lokal

di Kalimantan sudah sangat akrab mengusahakan rotan sebagai sumber penghidupannya. Di Katingan dan Kutai Barat, Kalimantan Timur dan Kapuas, Kalimantan Tengah, masyarakat sudah lama membudidayakan rotan.

Kutai Barat, Kalimantan Timur sangat dikenal sebagai penghasil rotan alam dan budidaya serta penghasil kerajinan rotan masyarakat. Bahkan ada upaya pemerintah setempat menjadikan Katingan sebagai sentra kerajinan rotan seperti layaknya Cirebon di Jawa.

Di Komunitas Dayak Benuaqk, di tiga komunitas besar di Kedang Pahu, masyarakat sudah mengusahakan rotan, baik mentah maupun setengah jadi, untuk bahan ekspor. Desa Pelepat Eheng, Jengan Danum, Lambing, Bentian, Tukqu, Tende dan Renda adalah kampung-kampung di Kedang Pahu yang masyarakatnya sebagian besar petani, pengumpul dan pengrajin rotan.

Rotan budidaya di lokasi ini banyak ditanam di DAS (Daerah Aliran Sungai) Kedang Pahu.

Pada 2004, Kapuas, Kalimantan Tengah sebagai penghasil rotan budidaya dan alam pernah menduduki peringkat tertinggi pemasok rotan di Indonesia, yaitu dua juta ton pertahun. Karena hampir tiga tahun sekali terjadi buka tutup kran ekspor rotan di Indonesia dan saat pada 2008, Pemerintah kembali melakukan pelarangan ekspor rotan mentah dan setengah jadi, berdampak kepada kehidupan masyarakat adat dan lokal di Kapuas.

Di Komunitas Dayak Ngaju di Kapuas, tanaman rotan berada di sepanjang sungai Mangkatip, Sungai Barito dan Sungai Kapuas dimana orang Ngaju hidup dan bertempat tinggal. Rotan di daerah ini ada dua jenis yang dibudidayakan masyarakat yaitu rotan taman dan rotan irit (masa panen 2-7 tahun).

Rotan jenis lain, rotan saga dengan harga paling tinggi di pasaran berkembang juga di wilayah ini. Rotan-rotan yang

tumbuh alami biasanya berada di hutan-hutan lebat di bawah lantai-lantai hutan dengan cara merambat ke pepohonan.

DAS Kapuas adalah wilayah Komunitas Dayak Ngaju untuk mengusahakan rotan budidaya dan alam. Di lokasi ini terdapat tujuh kampung yang masyarakatnya berusaha rotan dan pengembangan. Yaitu Kelurahan Mangatip, Mahanjandau, Sungai Jaya, Pulau Kaladan, Mantangai Hilir, Mandomai dan Katimpun.

Hasil-hasil kerajinan rotan seperti tikar, topi, tas dan alat-alat rumah tangga masih dikembangkan masyarakat adat atau lokal untuk pemenuhan kebutuhan setempat atau domestik. Untuk rotan setengah jadi sebagai bahan baku industri kerajinan dan meubel, rotan asal Kalimantan (Katingan, Kapuas, dan lain-lain) adalah pemasok utama industri kerajinan di Yogyakarta dan Cirebon di Jawa.

RMU dan Kemajuan Rotan Indonesia

Atas inisiatif KpSHK, Sawit Watch, AMAN, Telapak, Setara dan NTFP-IP

tercetus keinginan untuk memecahkan kebuntuan akan permasalahan rotan di Indonesia melalui "Rattan Monitoring Unit" atau disingkat RMU.

Strategi implementasi program akan dijalankan lewat pendekatan : (1) *Asset Base Product Development*, pengembangan produk dari komunitas akan didasarkan pada asset yang dimiliki oleh komunitas, (2) *Multi stakeholder communication approach*, pelaksanaan program akan membuka/menjalin komunikasi dengan seluruh komponen yang terkait dengan produk rotan mulai dari komponen masyarakat, swasta maupun pemerintah, dan (3) *Value Chain analysis*, sebagai pisau analisis untuk melihat perubahan nilai di rantai distribusi.

RMU tidak akan berjalan tanpa dukungan dari setiap pihak terkait, untuk itu dorongan serta input sangat berarti demi keberlangsungan monitoring terhadap perkembangan rotan Indonesia.